

**INFORMASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
JAWA TIMUR
2015**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Pahlawan No. 102 - 108 Surabaya - 60174

BOOKLET

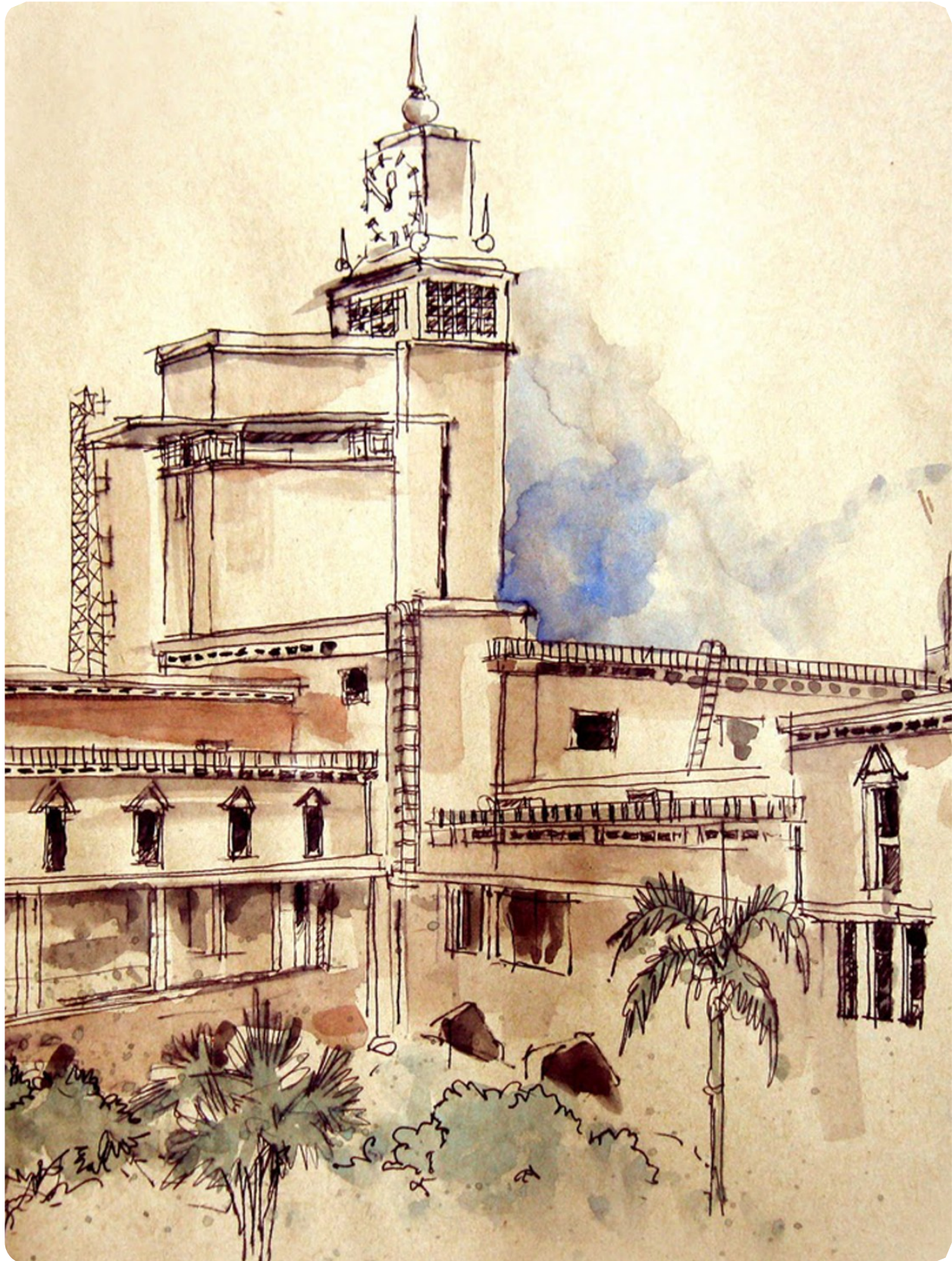
INFORMASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
JAWA TIMUR
2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
2015



DAFTAR ISI

1. Profil Bappeda Provinsi Jawa Timur	2
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	12
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur 2005-2025	16
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur 2014-2019	18
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Jawa Timur 2016.....	22
6. Masyarakat Ekonomi Asean	25



Kata Pengantar

Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses penting penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, yaitu yang lebih menonjolkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Timur di masa depan, dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.

Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Jawa Timur dalam menetapkan visinya berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya didasari oleh visi pembangunan Jawa Timur yaitu Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak.

Oleh karenanya dalam mewujudkan visi tersebut aparat perencana dituntut menjunjung tinggi aktivitas dalam membangun persepsi dengan pendekatan yang komprehensif, lintas disiplin dan lintas sektor. Mengutamakan kerja keras dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara terencana serta mampu mempertimbangkan segala tindakan dengan mengukur kemampuan potensi sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan dan mampu menyiasati perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Saya berharap Booklet Informasi Perencanaan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015 ini dapat bermanfaat tidak saja bagi pemerintah tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai media informasi perencanaan pembangunan di Jawa Timur.

Surabaya, 1 Desember 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur

ttd.

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, M.S.

PROFIL BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Visi

Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Berkualitas dan Partisipatif

Profesional dan Berkualitas

Aparatur perencana yang memiliki kemampuan, kemahiran dan kearifan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etik profesi, memiliki *self control* dan berorientasi pada mutu serta kualitas kinerja dengan cara kerja yang lebih efisien, efektif dan ekonomis, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat serta masalah-masalah masyarakat

Partisipatif

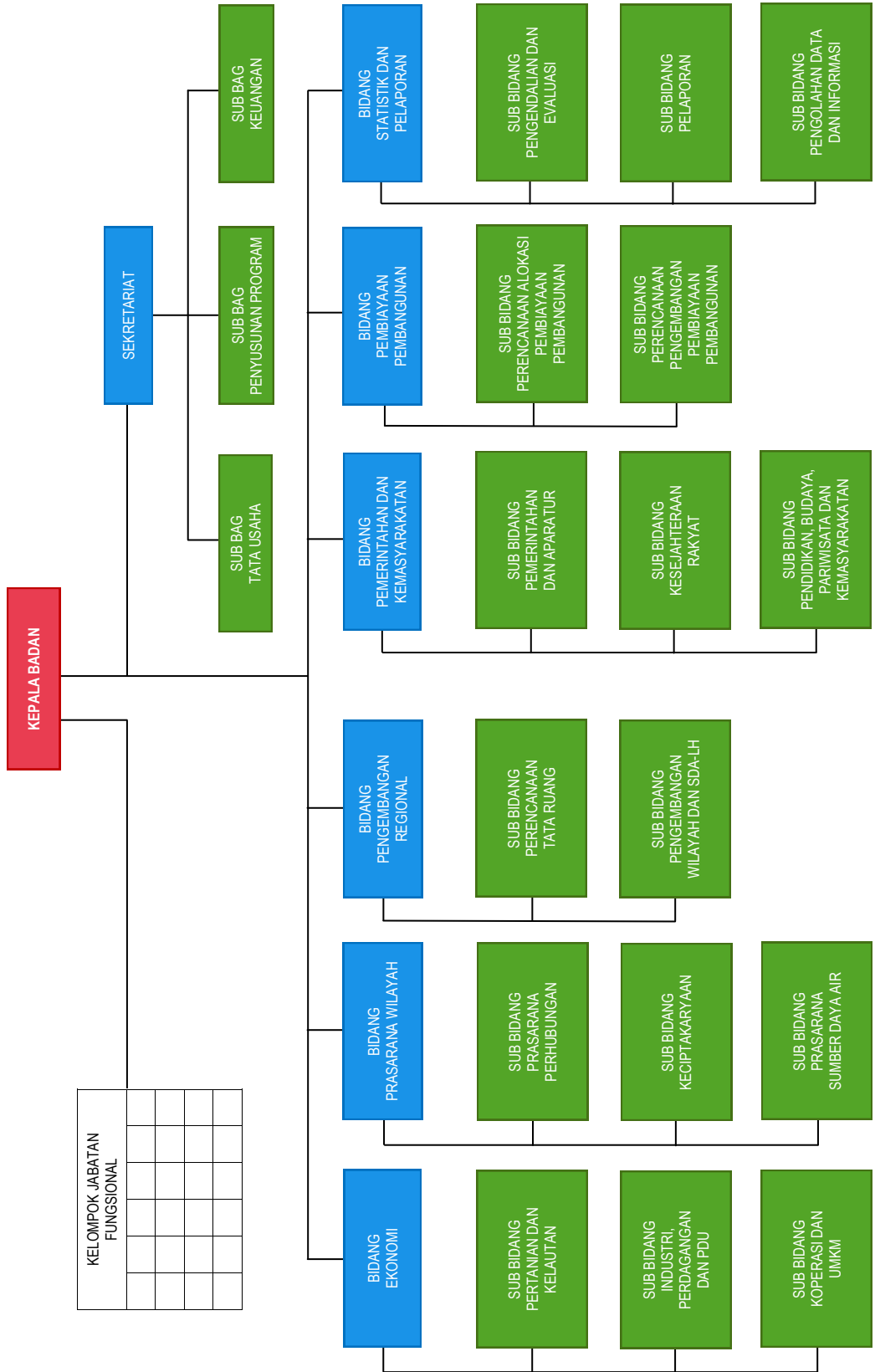
Lembaga yang terbuka terhadap saran, usul, dan ide dari berbagai pihak, serta mampu menampung aspirasi masyarakat



Misi

- Menyusun rencana pembangunan ekonomi, prasarana wilayah, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkualitas guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat.
- Menyusun rencana kebijakan anggaran pembangunan daerah yang akurat dan rasional.
- Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah guna mengakomodasikan berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan yang dapat

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR



SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- Pengelolaan kearsipan dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Sub Bagian Penyusunan Program ;
- Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas ;
- menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

- mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
- melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- melaksanakan pengolahan data;
- melaksanakan perencanaan program;
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- melaksanakan penyusunan laporan;
- menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

BIDANG EKONOMI

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi.
- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan bidang ekonomi;
- c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi.
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ekonomi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan ;
- b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
- c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian dan kelautan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup pertanian dan kelautan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BIDANG PRASARANA WILAYAH

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaannya dan prasarana sumber daya air;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah.
- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah .
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang Prasarana wilayah;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
- b. Sub Bidang Keciptakaryaannya;
- c. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana perhubungan.
- b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana perhubungan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup prasarana perhubungan
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana perhubungan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Sub Bidang Keciptakaryaannya, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup keciptakaryaannya.
- b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup keciptakaryaannya.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup keciptakaryaannya.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup keciptakaryaannya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana sumber daya air;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan regional yang meliputi perencanaan tata ruang, pengembangan wilayah dan sumber daya alam serta pengendalian ruang dan lingkungan hidup

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Regional mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dibidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkup bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana umum tata ruang (RUTR) kabupaten/kota ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Pengembangan Regional, terdiri dari:

- Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang;
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan melakukan evaluasi kebijakan makro penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan memaduserasikan perencanaan program pembangunan sektoral dengan perencanaan spasial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta fasilitasi
- Kebijakan kerjasama antar wilayah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka perumusan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan.
- Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari:

- Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah.
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan dan aparatur.

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah.
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan, aparatur, hukum dan keamanan serta kerjasama pemerintah daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kesejahteraan rakyat.
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat.
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat.
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.

BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
- Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang pembiayaan pembangunan ;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pembiayaan pembangunan ;
- Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pembiayaan Pembangunan, terdiri dari:

- Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan;
- Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan;

Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan melaksanakan inventarisasi permasalahan rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dibidang rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN

Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan Kinerja Pembangunan Sektoral;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Statistik dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan;

Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- b. Sub Bidang Pelaporan;
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh SKPD
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung-jawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir masajabatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi,

mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pembangunan ;
- c. Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Website dan Sistem Informasi yang dikelola
Bappeda Provinsi Jawa Timur**

Website dan Sistem Informasi	Bidang Pengelola
SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) http://sippd.jatimprov.go.id	Sekretariat
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) http://bappeda.jatimprov.go.id/ppid	Sekretariat
SIEVAP (Sistem Evaluasi Pembangunan Daerah) http://sievap.jatimprov.go.id	Bidang Statistik dan Pelaporan
SIEDAK (Sistem Informasi Evaluasi Dana Alokasi Khusus) http://bappeda.jatimprov.go.id/dak	Bidang Statistik dan Pelaporan
Pusat Data Provinsi Jawa Timur http://portal.jatimprov.intranet	Bidang Statistik dan Pelaporan
Official Site Bappeda Jawa Timur http://bappeda.jatimprov.go.id	Bidang Statistik dan Pelaporan
SITR (Sistem Informasi Tata Ruang) http://sitr.jatimprov.go.id	Bidang Pengembangan Regional
SJDSD GEOPORTAL (Simpul Jaring Data Spasial Daerah) http://geoportal.jatimprov.go.id	Bidang Pengembangan Regional
Sistem Informasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) http://csr.jatimprov.go.id	Bidang Pembiayaan Pembangunan
SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu) http://simpadu.jatimprov.go.id	Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sekretariat TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) http://tkpk.jatimprov.go.id	Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sistem Informasi Agropolitan http://agropolitan.jatimprov.go.id	Bidang Ekonomi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

VISI 2015-2019:

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong



MISI 2015-2019:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan



JOKOWI
JUSUF KALLA

Kebijakan Strategis:

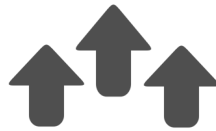
NAWACITA

Sembilan Agenda Prioritas

Nawa berasal dari bahasa sansekerta berarti sembilan dan Cita berarti tujuan.



- 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara



- 2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya



- 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan



- 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya



- 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia



- 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya



- 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik



- 8 Melakukan revolusi karakter bangsa



- 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia



JOKOWI
JUSUF KALLA

Kebijakan Strategis:

TRISAKTI

1

Kedaulatan dalam politik

- a. Pembangunan demokrasi politik
- b. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong

2

Berdikari dalam ekonomi

- a. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi dan distribusi nasional
- b. Pemenuhan hak dasar rakyat

3

Kepribadian dalam kebudayaan

- a. Pembangunan karakter dan kegotongroyongan
- b. Kebhinekaan dan kemaritiman sebagai potensi bangsa untuk demokrasi politik dan demokrasi ekonomi

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

1 Norma Pembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019

- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem

2 Tiga Dimensi Pembangunan

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Mental serta Karakter)
- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas (Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan Industri)
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan (Antar Kelompok Pendapatan, Antar Wilayah: Desa; Pinggiran; Luar Jawa; dan Kawasan Timur)

3 Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas

- a. Kepastian dan penegakan hukum
- b. Keamanan dan ketertiban
- c. Politik dan demokrasi
- d. Tata kelola dan reformasi birokrasi

4 Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya)

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) JAWA TIMUR 2005-2025

VISI 2005-2025:

**Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing
Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur
Makmur dan Berakhlak**



MISI 2005-2025:

1. Mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya
3. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan
5. Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik



2025

LEPAS LANDAS SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS BERKELANJUTAN



2019-2024

Diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dimana pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai



2015-2019

Ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat



2010-2014

Ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas dan distribusi produk, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian



2005-2009

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan tahap pertama diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan Agrobisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) JAWA TIMUR 2014-2019

VISI :

Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak



MISI :

Makin Mandiri dan Sejahtera
bersama Wong Cilik

STRATEGI UMUM :



1

Pembangunan berkelanjutan
berpusat pada rakyat,
inklusif dan partisipatoris



2

Pertumbuhan ekonomi
berpihak pada rakyat miskin
(*Pro - Poor Growth*)



3

Pengarusutamaan Gender



TUJUAN MISI RPJMD 2014-2019

Misi	Tujuan
<p>MISI 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan 2. Meningkatkan perluasan lapangan kerja 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan
<p>MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aktifitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi 2. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian 3. Meningkatkan ketahanan pangan 4. Meningkatkan net-ekspor perdagangan dalam dan luar negeri 5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri 6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata 7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah 8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.
<p>MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya 2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan
<p>MISI 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik
<p>MISI 5 : Meningkatkan kesalehan sosial dan harmoni sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama 2. Meningkatkan penguatan kearifan lokal 3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib 4. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM yang berkeadilan



PROGRAM UNGGULAN RPJMD 2014-2019

Misi	Program Unggulan
<p>MISI 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan wajib belajar 12 tahun b. Peningkatan dan perluasan BOSDA c. Pengembangan SMK mini dan BLK plus d. Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes e. Penguatan dan pengembangan Taman Posyandu f. Jawa timur bebas pasung (<i>zero pasung</i>) g. Penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir h. Peningkatan dan penuntasan RTLH i. Peningkatan pembangunan Rusunawa
<p>MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan UMKM b. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi c. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri d. Pengembangan karang kitri e. Peningkatan produksi tanaman pangan f. Penguatan dan pengembangan kantor perwakilan dagang g. Peningkatan investasi PMDN dan PMA h. Pengembangan industri pengolahan non-agro i. Peningkatan pembangunan Jitot dan Jides j. Peningkatan pembangunan embung <i>Geo Membrane</i> k. Pengembangan bandara perintis (antar-kota)
<p>MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan dan pengendalian pencemaran lingkungan b. Peningkatan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis c. Peningkatan konservasi sumber daya air
<p>MISI 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengembangan <i>e-Government</i> b. Pengembangan ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) c. Pengembangan dan perluasan zona integritas
<p>MISI 5 : Meningkatkan kesalehan sosial dan harmoni sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan forum kerjasama ekonomi lintas agama b. Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan c. Pengembangan forum resolusi dan pencegahan konflik d. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs religi e. Revitalisasi budaya dan kearifan lokal



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Target					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56 - 6,87	6,88 - 7,19	7,20 - 7,49	7,5 - 8,00	8,01 - 8,10	8,11 - 8,20
2	Indeks Gini	0,363 - 0,360	0,359 - 0,356	0,355 - 0,352	0,351 - 0,348	0,347 - 0,344	0,343 - 0,340
3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah)	20,41 - 20,75	20,76 - 20,89	20,90 - 20,95	20,96 - 21,01	21,02 - 21,08	21,09 - 21,14
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,72 - 12,22	12,21 - 11,73	11,72 - 11,22	11,21 - 10,71	10,70 - 10,20	10,19 - 9,69
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,32 - 4,23	4,22 - 4,13	4,12 - 4,03	4,02 - 3,93	3,92 - 3,83	3,82 - 3,73
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,15 - 73,45	73,46 - 73,76	73,77 - 74,07	74,08 - 74,38	74,39 - 74,69	74,70 - 75,00
7	Indeks Pembangunan Gender	67,18 - 67,78	67,79 - 68,39	68,40 - 69,00	69,01 - 69,61	69,62 - 70,22	70,23 - 70,83
8	Kualitas Air Sungai						
	a. BOD (mg/l)	3,59 - 3,57	3,58 - 3,56	3,57 - 3,55	3,56 - 3,54	3,55 - 3,53	3,54 - 3,52
	b. COD (mg/l)	10,91 - 10,86	10,87 - 10,83	10,84 - 10,80	10,81 - 10,77	10,78 - 10,74	10,75 - 10,71

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) JAWA TIMUR 2016

Tema :

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Akhir 2015



Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur Ekonomi :

- Public work* : Jalan Provinsi dan Jalur Lintas Selatan (JLS), jaringan irigasi, serta moda transportasi (untuk percepatan konektivitas Intra Jawa Timur dan Jawa Timur - Eksternal)
- Public utilities*: kelangsungan pasokan energi listrik dan gas, jaringan telekomunikasi (untuk menunjang Jawa Timur sebagai *supercoridor*)

Infrastruktur Sosial :

- Infrastruktur pendidikan difokuskan sarana dan prasarana sekolah dan perpustakaan
- Infrastruktur kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan revitalisasi puskesmas
- Perumahan, air minum dan sanitasi

Infrastruktur Administrasi :

- Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban
- Kontrol administrasi dan sistem pengendalian internal
- Koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
- Kebudayaan



Daya Saing

Daya Saing Regional :

- Stabilitas makro ekonomi
- Perencanaan pemerintahan dan institusi
- Tata kelola keuangan, fasilitasi dunia usaha dan bisnis (efisiensi), ketenagakerjaan (produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja)
- Kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur

Daya Saing Sektoral :

- Standardisasi produk barang di sektor (pertanian) meliputi standar proses dan standar produksi
- Standardisasi produk barang di sektor sekunder (industri) khususnya produk IKM dan UMKM
- Standardisasi produk jasa pendidikan, kesehatan dan sebagainya
- Standardisasi SDM tenaga terampil

Kebijakan dan Strategi Tahun 2016



Pendapatan Daerah

- a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI
- d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah
- e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
- f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan
- g. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
- h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
- i. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat



Belanja Daerah

- a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan belanja yang bersifat regular maupun rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- d. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan dan Strategi Tahun 2016



Pembiayaan Daerah

- a. **Penerimaan Pembiayaan**, meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah
- b. **Pengeluaran Pembiayaan**, pengeluaran pembiayaan direncanakan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program)
- c. **Pengembangan pembiayaan pembangunan** dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan formulasi yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing
- d. **Kemitraan Pembiayaan Daerah** yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/*Public Private Partnership*, tanggung-jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta dukungan Lembaga Non Pemerintah lainnya
- e. **Pengembangan Kerjasama Antar Daerah** melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela



STRATEGI

1

Pasar Tunggal dan Basis Produksi Bersama

- a. Aliran bebas barang
- b. Aliran bebas jasa
- c. Aliran bebas investasi
- d. Aliran bebas tenaga kerja terampil
- e. Aliran bebas modal
- f. Integrasi sektor-sektor prioritas
- g. Pengembangan sektor makanan, pertanian dan kehutanan

2

Kawasan Ekonomi Kompetitif

- a. Kawasan ekonomi kompetitif
- b. Pengembangan kebijakan persaingan
- c. Perlindungan konsumen
- d. Paten dan hak kekayaan intelektual lainnya
- e. Pembangunan infrastruktur
- f. Kerjasama energi
- g. Perpajakan
- h. e-Commerce

3

Pertumbuhan Ekonomi Setara

- a. Pengembangan UKM
- b. Mempersempit kesenjangan antar negara Asean melalui inisiatif integrasi Asean

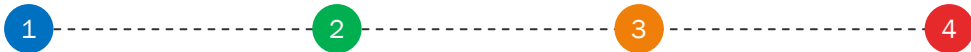
4

Integrasi dengan Perekonomian Dunia

- a. Pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal
- b. Peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global

Kawasan Asean pada 2015 diharapkan akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa, tenaga profesional, investasi, dan modal dapat bergerak bebas di antara negara-negara anggotanya sesuai kesepakatan yang telah dirumuskan bersama

KESEPAKATAN MEA 2015



ARTIGA

(Asean Trade In Goods Agreements)

- a. Penyederhanaan ketentuan
- b. Jadwal rencana dan besar penurunan tarif
- c. Sinergi oleh badan-badan sektoral di ASEAN (liberalisasi tarif, keterangan asal barang, ke-pabeanaan)
- d. Program kerja fasilitasi perdagangan untuk periode 2009-2015

ASW

(Asean Single Window)

ASEAN data model (Versi 2.0) mengacu organisasi kepabeanaan dunia (WCO), organisasi internasional untuk standarisasi (ISO), dan Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE).

AFAS

(Asean Framework Agreement On Services)

- a. Tahun 2010, AFAS 8 (4 sektor prioritas – 80 sub sektor)
- b. Tahun 2013, AFAS 9 (104 sub sektor)
- c. Tahun 2015, AFAS 10 (128 sub sektor)

ACIA

(Asean Comprehensive Investment Agreement)

- a. Pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal
- b. Peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global



Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

INPRES NOMOR 6 TAHUN 2014

Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada:

- Pengembangan Industri Prioritas dalam rangka memenuhi Pasar ASEAN
- Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri
- Pengembangan Industri Kecil Menengah
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian
- Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengembangan Pertanian, yang fokus pada:

- Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian
- Peningkatan Akses Pasar

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang fokus pada:

- Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan
- Penguatan Pasar Dalam Negeri
- Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor

Pengembangan Energi, yang fokus pada:

- Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak)
- Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi
- Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik

Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada:

- Pengembangan Infrastruktur Konektivitas
- Peningkatan Daya Saing Infrastruktur
- Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Pengembangan Perbankan

Pengembangan Investasi, yang fokus pada:

- Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum
- Kemudahan berusaha, perluasan investasi
- Database Investasi, Peningkatan Daya Saing Investasi
- Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada:

- Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Sisi Pembiayaan
- Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:

- Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:

- Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri
- Peningkatan Akses Pasar

Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:

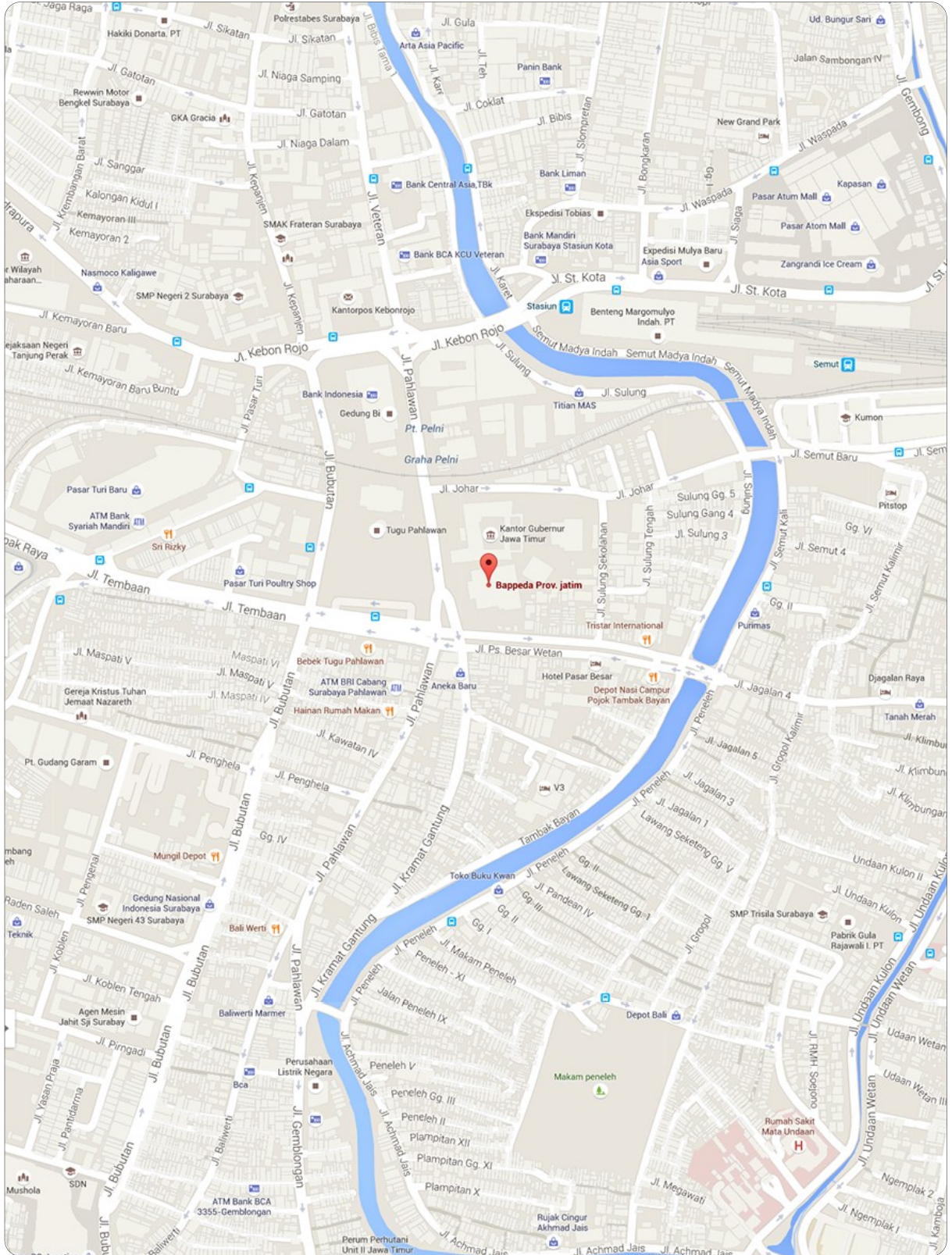
- Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri
- Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional
- Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
- Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor
- Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pengembangan Kepariwisata, yang fokus pada:

- Pengembangan Destinasi Wisata
- Pengembangan Acara (*event*) Pariwisata

Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:

- Pengembangan wirausaha pemula
- Perluasan peran wirausaha muda
- Pengembangan usaha berbasis temuan baru (*Invention/Resources and Development*)





Informasi lebih lanjut hubungi:

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya - 60174
Telp: (031) 355 48 55
Website: bappeda.jatimprov.go.id